

Memberangus Nafsu (Kuasa) Tahun Baru

Tahun 2018 adalah tahun Politik. Lugasnya, tahun pertarungan kekuatan para elite politik berebut kekuasaan. Arena politik lebih bernuansa menampilkan para petugas partai yang haus kemenangan, bukan kompetisi kesatria adu siasat bertujuan memuliakan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. Kalaupun terdapat kekecualian, jumlahnya hanya hitungan jari. Pilkada serentak 2018 dikhawatirkan hanya repetisi pilkada sebelumnya. Wacana publik akan ditaburi oleh kebohongan, kebencian, dan permusuhan.

Bahkan, tidak mustahil, didorong nafsu kuasa yang menggebu, elite politik akan *copy paste* mempergunakan strategi politik identitas sebagai senjata pamungkas untuk menekuk lawan politiknya. Bayang-bayang trauma keterbelahan publik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menghantui berbagai kalangan masyarakat. Publik tidak dapat menyembunyikan kecemasan karena ancaman semburan polusi beracun yang diproduksi para pemburu dan pembiak kekuasaan. Kompetisi politik menjadi ajang mengumbar nafsu kuasa, memanipulasi politik identitas, memelintir kata dan penggalan fakta; yang selalu siap menenggelamkan akal sehat manusia.

Peristiwa tersebut dapat menjadikan orang baik terbelah karena religi dan politik, sebagaimana diungkapkan Jonathan Haidt (*The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion*, 2012). Ia menyimpulkan standar moralitas manusia pertama-tama dibentuk oleh intuisi nilai-nilai moral komunal, antara lain kepercayaan, keyakinan dan religi, dan baru kemudian akal budi memberikan justifikasi, merelativisasi atau menolak nilai-nilai tersebut. Jika keawaran opini publik diabrak-abrik oleh politik identitas, potensi konflik horizontal besar sekali.

Meski demikian, tahun 2018 tetap memantulkan secercah harapan. Pertama, ketahanan publik cukup tangguh melawan serbuan politik identitas yang mengeksploitasi insting primer manusia demi nikmat kuasa. Tingkat keawaran publik masih cukup prima sehingga tidak hanyut menjadi kemelut.

Kedua, masyarakat sipil tidak bosan-bosan menyerukan agar Pilkada 2018 dilakukan secara tertib dan tidak mengeksploitasi sentimen primordial. Bahkan, Rapat Kerja Nasional III Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Bogor (*Kompas*, 1/12/2017) menyerukan agar kontestan pilkada mengutamakan kesantunan dan tidak provokatif. KH Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Ketua Umum MUI, menegaskan, pilkada mengedepankan kepentingan umum, tidak menggunakan segala cara tanpa menghiraukan dampak buruk bagi masyarakat. Mengingat tensi politik Pilkada 2018, jika tidak dikelola baik, dapat memicu konflik horizontal (*Kompas*, 22/12/2017).

Ketiga, relasi yang semakin harmonis antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjono dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Panglima TNI dapat dipastikan kukuh dengan tekad agar TNI tidak berpolitik praktis. Perintah tersebut pasti dilaksanakan di semua tingkat dan jajaran TNI karena Panglima TNI sendiri steril dari aroma perpolitikan. Sementara itu, Kapolri lebih mantap dalam menegakkan hukum, terutama berkaitan dengan para pelaku yang mengumbar kebencian dan permusuhan yang menggerogoti pilar-pilar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terakhir, terbongkarnya kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) berkat kegigihan yang luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dukungan publik telah mengantarkan Setya Novanto duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. KPK diharapkan dapat mengurai jaringan para koruptor dalam megaskandal korupsi tersebut. Pengalaman buruk penguasa yang jumlahnya sudah ratusan bahkan mungkin ribuan menjadi pesakitan KPK dan penegak

hukum lainnya dapat mengerem para pemburu kuasa mempergunakan kedudukannya menguras kekayaan negara.

Untuk jangka panjang diharapkan kampanye lebih mengutamakan kualitas kader yang mewacanakan perdebatan kebijakan daripada menghamburkan uang untuk pencitraan. Iklim politik pun akan lebih teduh apabila Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru menarik kader-kader Partai Golkar dari Panitia Angket DPR terhadap KPK. Sekiranya harapan tersebut dapat diwujudkan, pemilu serentak tahun 2019 diharapkan dapat menghasilkan lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas daripada DPR periode 2014-2019. Sementara itu, pemilihan presiden (pilpres) yang dipilih secara konkuren dengan pemilu legislatif diharapkan memproduksi pemerintahan yang efektif.

Dengan menapak tahun baru, rakyat bersama para elite politik yang berkehendak mulia secara bahu-membahu memberangus nafsu kuasa para penikmat kekuasaan agar perpolitikan semakin beradab. Kolaborasi sangat memungkinkan karena tidak sedikit elite politik yang gerah dan gelisah terhadap praktik politik yang menghalalkan segala cara, terutama tega meluluhlantakkan negara-bangsa dengan memanfaatkan titik paling rawan manusia, yakni eksploitasi maksimum intuisi primitif.

Mengingat pemberangusan nafsu kuasa adalah upaya mengelola gejolak jiwa manusia, negara harus mempunyai politik pendidikan yang jelas. Ringkasnya, mendidik adalah membangun karakter manusia muda, bukan hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan. Dua hal terakhir tersebut dengan mudah diperoleh di Google dan Youtube.

J KRISTIADI